

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUM
POS DAN GIRO MENJADI PT POS INDONESIA
(PERSERO)**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

**GALIH RIGEN WIBISONO
C 100 050 193**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Diantara sarana-sarana yang ada untuk mencapai sasaran tersebut adalah adanya dorongan yang menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi. Dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi maka perekonomian Indonesia tidak menutup diri dari pengaruh globalisasi, sehingga hal tersebut menuntut kembali dari para ahli ekonomi, hukum untuk mengembangkan perekonomian dan memnbuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Globalisasi perdagangan bebas antar negara dan antar bangsa sudah tidak bisa dihindari lagi. Disatu pihak bagi negara-negara maju, ekspansi merupakan kegiatan usaha yang merupakan syarat mutlak, khususnya persaingan yang sudah demikian ketat dalam negara mereka sendiri. Tidaklah mengherankan kalau Indonesia dalam menghadapi globalisasi belum siap untuk menghadapi persaingan bebas, sehingga nampak sekali ketinggalan tersebut pada hukum perdata dan hukum dagang yang selama ini mengatur lalul intas bisnis. Sebagai contoh misalnya mengenai perusahaan Negara (Perum, Perjan, Persero) penanaman modal asing dan luar negeri.

Selama ini telah terbiasa perusahaan negara maupun perusahaan swasta memperoleh perlindungan dari pemerintah dalam bentuk diberikannya kemudahan-kemudahan yang bersifat istimewa dalam menjalankan usahanya untuk menghadapi persaingan bebas. Dalam rangka perlindungan terhadap perusahaan negara maupun perusahaan swasta pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalnya dengan membuat peraturan perundang-undangan, atau restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.¹

Bentuk hukum usaha Negara Perum, Perjan, Persero didirikan dengan maksud diciptakan keseragaman dalam menguasai, mengurus serta menyeragamkan bentuk-bentuk hukum dari usaha negara, agar secara ekonomis dapat dicapai hasil guna dan daya guna yang setinggi-setingginya bagi kepentingan pembangunan dan kemakmuran Bangsa dan Negara.

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu factor yang ikut meneuntukan berhasilnya pembangunan. Disamping telah ditegaskan dalam GBHN bahwa pemerintah wajib menmberei pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dengan merestruktusasi terhadap perusahaan-perusahaan Negara. Perusahaan Negara dalam PP No.3 tahun 1993 merupakan pemisahan ketiga

¹ Agus Brotosusilo, *Analisis Ekonomi Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Dalam pertemuan ilmiah tentang analisi ekonomi terhadap hokum dalam era globalisasi oleh BPHN.

bentuk BUMN tersebut. tidak lagi dilihat secara factual yuridis tetapi lebih dilihat secara fungsional, ditentukan bahwa²:

1. Perjan diutamakan untuk kegiatan dibidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, termasuk pelayanan bagi masyarakat.
2. Perum lebih di utamakan untuk berusaha dibidang penyediaan bagi pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan.
3. Persero lebih diarahkan untuk memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi di luar bidang perjanjian dan perum.

Kemudian pada tahun 1988 dicanangkan pula policy restrukturisasi BUMN, karena dalam kenyataannya BUMN banyak merugi. Sulit dapat kita bayangkan, bahwa perusahaan-perusahaan negara yang diberikan fasilitas oleh Negara justru banyak yang merugi. Restrukturisasi terhadap perusahaan BUMN di maksudkan antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang dalam hal ini di lakukan dengan cara³:

1. Perubahan status atau bentuk hukum BUMN kearah yang lebih menunjang maksud pencapaian maksud dan tujuan perusahaan. Misalnya dari perjanjian ke perum atau perum ke persero.
2. Kerja sama operasi atau kontrak manajemen dengan pihak ketiga.
3. Konsolidasi atau merger.
4. Pemecahan badan usaha.
5. Penjualan saham melalui pasar modal.
6. Penjualan saham secara langsung.
7. Pembentukan perusahaan patungan.

² Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Prjan, Perum, Persero

³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1994, Hlm 43

Restrukturisasi BUMN ini sangat di rasakan manfaatnya dalam praktek. Karena iu setelah tahun 1990 telah terjadi banyak kasus restrukturisasi BUMN dimana⁴:

1. Perubahan bentuk menjadi persero sebanyak 28 buah.
2. Perubahan bentuk menjadi perum sebanyak 3 buah.
3. Perubahan percetakan Negara dari perusahaan Negara menjadi perum.

Restrukturisasi BUMN dari perum menjadi persero yang berarti harus menjual saham sebagai modal kepada masyarakat atau lewat pasar modal merupakan salah satu langkah ideal, tetapi persyaratan untuk itu cukup ketat satu dengan yang lain. Hal ini mengingat cukup ketatnya aturan lain di bursa-bursa saham sementara kinerja perusahaan BUMN umumnya masih rendah. Di dalam pasal 4 UU No.9 tahun 1969 di tegaskan bahwa semua perusahaan negara (perum, perjan) yang akan beralih kedalam bentuk persero, dalam peralihan bentuk ini secara formal maka perusahaan Negara yang bersangkutan harus di likuidir dan hasilnya masuk kedalam kas Negara.⁵ Mengenai pendirian persero diatur dalam PP No.45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, di samping ketentuan-ketentuan tentang PT yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 dalam pembahasan ini restrukturisasi BUMN yang akan di bahas adalah perubahan bentuk badan hukum dari Perum ke Persero, maka contoh perusahaan BUMN yang akan diambil adalah perubahan Perum Pos dan

⁴ Munir Fuady, *Ibid*, Hlm.44

⁵ Pasal 4 Undang-Undang No.9 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero) dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha penyalenggaraan jasa Pos dan Giro. Perusahaan yang berbentuk atau telah berubah menjadi PT yang telah memenuhi syarat maka diberi kesempatan untuk menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat dan masyarakat di beri kesempatan untuk membeli saham-saham tersebut.

Dengan demikian Perum Pos dan Giro yang merupakan perusahaan milik negara di mana modalnya berasal dari negara dengan berubah bentuk menjadi PT Pos Indonesia (Persero) maka modalnya bisa berasal dari penjualan saham kepada masyarakat. Dengan di keluarkannya PP No.5 tahun 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan PP no.24 tahun 1984 di alihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan, maka Perum Pos dan Giro dinyatakan bubar pada saat pendirian perusahaan perseroan dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perum Pos dan Giro yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan. Dan modal perusahaan perseroan yang di tempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal kekayaan negara yang tertanam dalam Perum Pos dan Giro. Perubahan atau pengalihan bentuk perum pos dan giro menjadi PT Pos Indonesia maka terjadi perubahan-perubahan prinsip yang ada dalam perusahaan tersebut.

Selama berbentuk Perum Pos dan Giro pegawainya berstatus pegawai perusahaan yang diatur sendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau pegawai swasta. Berdasar pasal 48 ayat 1 PP No.24 tahun 1984 tentang Perum Pos dan Giro, disebutkan bahwa kepada pegawai perusahaan,

hal ini menunjukkan bahwa status pegawai adalah pegawai negeri karena bagi pegawai diberikan hak pensiun. Setelah berubah menjadi PT Pos Indonesia status pegawainya harus berubah. Dalam perusahaan persero status pegawainya seharusnya berstatus sebagai perusahaan swasta biasa.

“Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan”.⁶

Maksud pasal ini bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perum Pos dan Giro yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PT Pos Indonesia.

Mengenai modal PT Pos Indonesia (Persero) dalam pasal 3 PP no.5 tahun 1995 tentang pengalihan bentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero), modal perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) berasal dari modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Perum Pos dan Giro. Modal Perum Pos dan Giro, dalam Pasal 7 PP no.24 tahun 1984, modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi dalam saham-saham.⁷ Mengenai organ perusahaan dalam Perum Pos dan Giro dalam pasal 13 No.24 Tahun 1984 dipimpin oleh direktur utama untuk dan atas

⁶ Pasal 1 Ayat 2 PP No.5 Tahun 1995 tentang pengalihan bentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)

⁷ PP no.24 tahun 1984 Tentang Perum Pos dan Giro

nama direksi menerima petunjuk dan bertanggung jawab kepada menteri dan menjalankan tugas pokok perusahaan. Setelah berubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero) disamping direksi terdapat komisaris dan RUPS. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada menteri Keuangan selaku RUPS dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara.

Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul “ PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUM POS DAN GIRO MENJADI PT POS INDONESIA (PERSERO)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perubahan bentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan bentuk badan hukum, Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)?
3. Bagaimana tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila terjadi perubahan bentuk dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan lebih mengetahui dan lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik teoritis maupun segi praktis.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perubahan bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi PT Pos Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui akibat bagi kegiatan perusahaan bila terjadi perubahan bentuk dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila terjadi perubahan bentuk dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata pada umumnya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Pers 1986, Hal 3

- b. Memberikan gambaran mengenai perubahan bentuk badan hukum suatu perusahaan
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkan kedalam praktek

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pola pikir dan menerapkan ilmu yang diperoleh oleh penulis.
- b. Mengetahui permasalahan yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang berjalan untuk mempeleajari satu atau beberapa gejala hokum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹ Jadi suatu metode dipilih atas dasar pertimbangan mengenai keserasianya dengan obyek, serta metode yang akan digunakan dapat berjalan dengan tujuan, sasaran dan masalah yang hendak diteliti.

1. Obyek Penelitian.

Perubahan bentuk badan hokum Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero)

⁹ Khudzaifah Dimiyati & Kelik wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

2. Jenis Penelitian.

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹⁰ Penelitian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan dengan baik, jelas serta data yang lengkap mengenai obyek yang akan diteliti., yaitu untuk menggambarkan perubahan bentuk badan usaha milik Negara dari Perum menjadi Persero.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang akan dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹¹

4. Sumber Data.

a). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (PT Pos Indonesia) yang ada hubungannya dengan maksud penelitian.

b). Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni terdiri atas:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Pers 1996, Hal 42

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1981, hal 53

- (1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan lain yang mengenai penelitian ini.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil seminar, karya dari ahli hukum, buku-buku yang mana berkaitan dengan penelitian ini.
- (3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari subyek penelitian berupa:

(1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

(2) Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya. Untuk memperoleh gambaran yang

lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang tidak ditemukan dalam teori.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum dengan cara pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh diteliti dan diseleksi menurut kualitas dan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipilah-pilah atau dijabarkan berdasarkan pengertian-pengertian hukum.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum akan memberikan gambaran yang tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dipahami mengenai materi pembahasan dalam penelitian hukum, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud penelitian hukum secara jelas. Didalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab akan dibagi kedalam sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perusahaan
 - 1. Pengertian Tentang Perusahaan
 - 2. Arti Hukum Perusahaan
- B. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas
 - 1. Definisi Perseroan Terbatas
 - 2. Tata Pendirian Perseroan Terbatas
 - 3. Modal Perseroan
 - 4. Organ-organ Dalam Perseroan
- C. Tinjauan Tentang Perusahaan Umum
 - 1. Pengertian perusahaan umum
 - 2. Dasar hukum Perusahaan Umum
- D. Perusahaan Perseroan
 - 1. Pengertian Persero
 - 2. Dasar Hukum Persero

3. Penyertaan Modal Negara Dalam Persero
4. Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Menjadi Persero

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Perubahan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi PT Pos Indonesia (Persero)
- B. Akibat Hukum Perubahan Bentuk Perum Pos Dan Giro Menjadi PT Pos Indonesia (Persero)
- C. Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Bila Terjadi Perubahan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi PT Pos Indonesia (Persero)

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran